

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 *Agency Theory*

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Investor memberikan wewenang pada manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan

pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Untuk meredam tindakan para *agent* yang tidak sesuai dengan kepentingannya *principal* memiliki dua cara yaitu (Jensen dan Meckling, 1976;Subramaniam,*et al.*, 2009):

1. Mengawasi perilaku *agent* dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan *agent* dengan kepentingan *principal*.
2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada *agent* dan mengadakan struktur *reward* yang dapat membujuk para *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Govindarajan (2008) menyatakan satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan tertarik hanya pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan.

Penggunaan teori agensi telah banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang keberadaan komite (Ruigrok, *et al.*, 2006 dan Benz dan Frey (2007) dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Secara umum, komite-komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan internal di dalam perusahaan

dan keberadaan komite pengawas yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya agensi tinggi, seperti *leverage* tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

2.1.2 Signalling Theory

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain dan informasi lainnya. Ketika digunakan dalam praktek pengungkapan perusahaan, *signalling theory* secara umum menguntungkan bagi perusahaan untuk mengungkapkan praktek *corporate governance* yang baik, sehingga dapat menciptakan kualitas perusahaan yang baik dalam pasar (Subramaniam, *et al.*, 2009). Salah satu bentuk sinyal tentang kualitas perusahaan tersebut adalah pembentukan komite, yang memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dalam segi pengawasan dibandingkan dengan perusahaan lain. Menurut *signalling theory*, walaupun belum ada peraturan yang memandatkan mengenai pembentukan RMC sebagai komite yang secara khusus berperan dalam pengawasan risiko, perusahaan tetap dapat membentuk RMC dalam komitmennya menuju praktek *good corporate governance*.

2.2 Risk Management Committee (RMC)

Risk Management Committee (RMC) adalah sebuah sub komite pengawas manajemen yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada tingkat dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan. (KPMG., 2001 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009) .

Saat ini, RMC sangat populer sebagai sebuah komite pengawasan yang membantu dewan komisaris (Fields dan Keys, 2003 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

Secara umum area tugas dan wewenang RMC meliputi:

1. Mempertimbangkan strategi manajemen risiko organisasi
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi
4. Memastikan bahwa organisasi dalam prakteknya memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 2004; Sullivan, 2001; Sultani, 2006 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009) .

Dalam penerapannya RMC dibagi menjadi dua jenis yaitu RMC yang berdiri sendiri (terpisah) dan RMC gabungan (dikombinasikan dengan komite audit). RMC terpisah memiliki kualitas pengendalian internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan RMC gabungan. Hal ini didasarkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan dalam meminimalkan risiko. RMC memungkinkan dewan direksi untuk lebih efektif menangani dan menilai berbagai ancaman dan peluang yang dihadapi oleh entitas.

RMC yang terpisah akan memungkinkan anggota komite untuk sepenuhnya fokus pada proses penanganan risiko. Hal ini memberikan kualitas pemantauan internal yang lebih baik daripada sebuah komite gabungan. Sebuah RMC gabungan dan komite audit tidak hanya mengawasi risiko manajemen tapi secara aktif juga terlibat dengan pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles et al., 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009)

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Risk Management Committee

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *risk management committee* pada penelitian ini adalah:

2.3.1 Ukuran Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG 2006).

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berubung dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

(*transparency, accountability, responsibility, fairness*). (Alijoyo dan Zaini, 2004 dalam Yudiati (2011).

2.3.2 Auditor *Big Four*

Auditor *Big Four* dipandang memiliki reputasi baik. Secara umum akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai praktek *corporate governance* terbaik, khususnya mengenai pembentukan RMC (Chen, *et al.*, 2009 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Hal ini dimotivasi oleh kebutuhan akan pemeliharaan kualitas audit dan perlindungan akan reputasi mereka (Subramaniam *et al.*, 2009).

Adapun kategori KAP *the big four* di Indonesia:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang berafiliasi dengan KAP Tanudirejo, wibisana dan rekan.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang berafiliasi dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
3. KAP *Ernest and Young*, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

2.3.3 Kompleksitas

Secara umum, kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimilikinya. Kompleksitas perusahaan yang besar dapat meningkatkan risiko dalam *level* yang berbeda, termasuk risiko operasional dan teknologi, sehingga dibutuhkan mekanisme pengawasan risiko yang lebih besar (Subramaniam, *et al.*, 2009).

2.3.4 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar-kecilnya suatu perusahaan. Beberapa proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu, total asset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Peneliti menggunakan total asset sebagai ukuran perusahaan karena diantara ketiga proksi diatas, total aktiva dinilai lebih stabil dibandingkan dengan penjualan dan kapitalisasi pasar.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994 dalam Pratika 2011).

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008.

Peraturan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran tersebut antara lain:

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih \leq Rp50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan \leq Rp. 300.000.000,-.
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-.

- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-.
- d. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih \geq Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan \geq Rp. 50.000.000.000,-.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan *risk management committee* menunjukkan hasil yang berbeda. Subramaniam, *et al.*, (2009) dalam penelitiannya menggunakan variabel CEO independen, proporsi komisaris independen, ukuran dewan, *leverage*, tipe industri, segmen usaha, proporsi piutang dan persediaan terhadap asset, dan *big four* auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan dan proporsi komisaris independen saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* sedangkan variabel CEO independen, *leverage*, tipe industri, segmen usaha, proporsi piutang dan persediaan terhadap asset, dan *big four* auditor tidak berpengaruh.

Yatim (2009) juga melakukan penelitian tentang hal ini dan dalam penelitiannya menggunakan variabel ukuran perusahaan, kompleksitas, *leverage*, *big four* auditor, tipe industri, ukuran dewan, kerajinan komite audit, keahlian komite dan independensi komite audit. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas, auditor *big four*, ukuran dewan, kerajinan komite audit,

berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* sedangkan variabel *leverage*, tipe industri, keahlian komite dan independensi komite audit tidak berpengaruh.

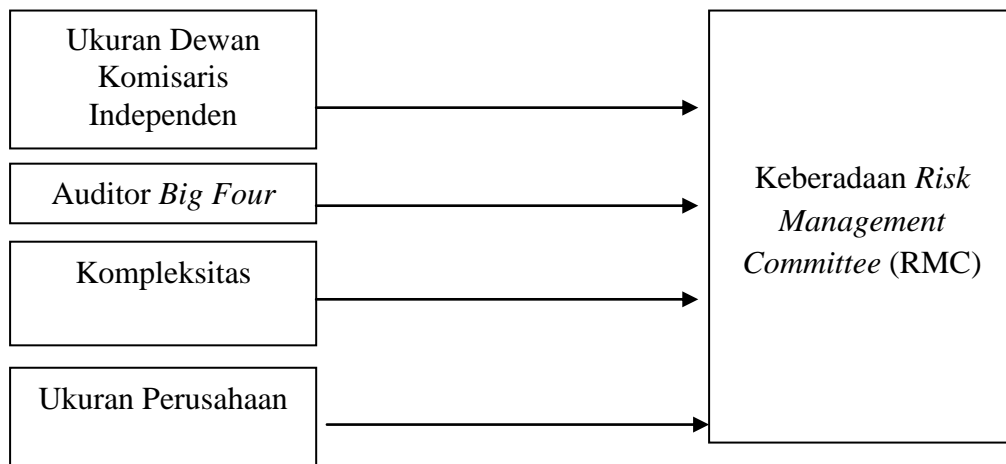
Kemudian untuk penelitian di Indonesia, Andarini dan Januarti (2010) menggunakan tujuh variabel yaitu komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, ukuran perusahaan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* sedangkan variabel lainnya yaitu, komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, tidak berpengaruh. Sedangkan dalam penelitian Pratika (2011) menggunakan tujuh variabel yaitu, komisaris independen, ukuran dewan, *big four* auditor eksternal, segmen bisnis, proporsi piutang dan persediaan, proporsi utang jangka panjang, ukuran perusahaan. Namun hasilnya menunjukkan bahwa hanya *big four* auditor eksternal saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* sedangkan variabel lainnya yaitu, komisaris independen, ukuran dewan, segmen bisnis, proporsi piutang dan persediaan, proporsi utang jangka panjang, ukuran perusahaan tidak berpengaruh.

Setyarini (2011) pun melakukan penelitian tentang hal ini dan menggunakan menggunakan tujuh variabel yaitu komisaris independen, ukuran dewan, reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, frekuensi rapat. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya reputasi auditor saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* sedangkan variabel

komisaris independen, ukuran dewan, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage, frekuensi rapat, tidak berpengaruh.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian ini disusun berdasarkan variabel-variabel penelitian, yaitu:



2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Ukuran Dewan dan keberadaan *risk management committee* (RMC).

Independensi merupakan hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Proporsi komisaris independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009). Pincus, *et al.* (1989) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen di dalam sebuah dewan akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholders*. Perusahaan dengan proporsi

komisaris independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC mungkin dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggungjawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi komisaris independen yang rendah.

Penelitian Yatim (2009) memberikan sebuah hasil yaitu sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar cenderung untuk membentuk RMC, Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan keberadaan RMC.

2.6.2 Auditor *Big Four* dan keberadaan *risk management committee* (RMC).

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu *self-interest*, maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara *principle* dengan *agent* sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Auditor yang termasuk *the big four* cenderung mendorong kliennya untuk menerapkan *good corporate governance*. Terutama dalam pembentukan komite baru untuk membantu dewan komisaris menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini dimotivasi oleh kebutuhan untuk memelihara kualitas audit dan perlindungan atas reputasi mereka (Subramaniam, *et al.*, 2009). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yatim (2009) dan Briana (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *Big Four* cenderung untuk membentuk RMC.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Auditor *big four* berpengaruh positif dengan keberadaan RMC.

2.6.3 Kompleksitas dan keberadaan *risk management committee* (RMC).

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin kompleks suatu perusahaan akan meningkat juga risiko yang dihadapi perusahaan. Kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntut terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009). Sehingga untuk mengatasi hal ini dewan komisaris dapat membentuk komite baru yang khusus mengawasi risiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kompleksitas berpengaruh positif dengan keberadaan *risk management committee* (RMC).

2.6.4 Ukuran Perusahaan dan keberadaan *risk management committee* (RMC).

Berdasarkan teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Selain itu perusahaan besar juga berpotensi terhadap risiko kebangkrutan apabila perusahaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Semakin besar perusahaan akan semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, peraturan, dan risiko informasi (KPMG, 2011 dalam Andarini dan Januarti, 2010). Untuk mengatasi masalah ini maka dewan komisaris dapat membentuk komite baru yang khusus mengawasi risiko.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Yatim (2009) dan Andarini dan Januarti (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap keberadaan *risk management committee* (RMC).

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dengan keberadaan *risk management committee* (RMC).